



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.74,2009

AGREEMENT. Indonesia-Tunisia. Pembebasan  
Visa. Paspur Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG  
PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK  
DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR  
DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bali, pada tanggal 23 November 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspur Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 November 2006 di Bali, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2009

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA  
TENTANG  
PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia, yang selanjutnya disebut para "**Pihak**";

**MEMPERTIMBANGKAN** kepentingan kedua negara untuk lebih memperkuat hubungan bersahabat diantara kedua negara;

**BERKEINGINAN** untuk memfasilitasi perjalanan masuk warga negara Republik Indonesia dan warga negara Republik Tunisia ke dalam wilayah negara masing-masing;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENYETUJUI** sebagai berikut:

**PASAL 1  
PEMBEBASAN VISA**

Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang berlaku, dan warga negara Republik Tunisia, pemegang paspor diplomatik dan paspor khusus yang berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa masuk, visa transit dan ijin tinggal di dalam wilayah Pihak lain dalam jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal 30 (tiga puluh) hari atas dasar persetujuan dari negara penerima dan permintaan tertulis dari misi diplomatik atau konsuler dari Pihak lainnya.

**PASAL 2  
MASA BERLAKU PASPOR**

Jangka waktu berlakunya paspor dari warga negara setiap Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

**PASAL 3  
PEMBATASAN VISA**

Pemegang paspor yang berlaku dari setiap Pihak merujuk kepada Persetujuan ini diperbolehkan memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya di tempat manapun yang diizinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun.

**PASAL 4  
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER**

Warga negara dari masing-masing Pihak pemegang paspor yang berlaku, merujuk pada Pasal 1 dari Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (yang dimaksud anggota keluarga adalah suami/isteri dan anak-anak yang belum menikah), disyaratkan, pada saat mereka tiba di wilayah Pihak lainnya, untuk memperoleh ijin tinggal yang sesuai dari Kementerian Luar Negeri Pihak lain.

**PASAL 5  
HAK INSTANSI YANG BERWENANG**

Setiap Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan ijin masuk atau memampendek masa tinggal bagi seseorang yang berhak atas bebas visa dan fasilitas berdasarkan Persetujuan ini, apabila orang tersebut dianggap tidak diharapkan.

**PASAL 6  
PENUNDAAN**

1. Masing-masing Pihak, setiap saat, dapat menunda sementara waktu, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Persetujuan ini, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum.
2. Berlakunya maupun berakhirnya tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik.

**PASAL 7  
SPESIMEN PASPOR**

Para Pihak saling menukarkan, melalui jalur diplomatik, spesimen paspor yang digunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini berlaku atau spesimen paspor baru apapun sebelum penerbitannya.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan.

**PASAL 9  
AMANDEMEN**

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi setiap saat berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh kedua Pihak. Amandemen atau revisi tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Pihak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Persetujuan ini.

**PASAL 10  
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya melalui jalur diplomatik bahwa persyaratan dalam negeri untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan berlaku sampai salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik, 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhirannya.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

**DIBUAT** dalam dua rangkap di Bali pada 23 November 2006, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Semua naskah adalah asli. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK TUNISIA**

Dr. N. Hassan Wirajuda  
Menteri Luar Negeri

Abdel Wahab Abdallah  
Menteri Luar Negeri

EMBASSY OF TUNISIA

JAKARTA  
N°482 /2009

سفارة تونس  
جاكرتا  
r887

The Embassy of the Republic of Tunisia presents its compliments to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and with reference to the Latter's note n° D.098/PO/II/2009/59 dated February 06<sup>th</sup>, 2009, regarding the rectification proposed by the Indonesian side ( replacing the word "*PERJANJIAN*" by the word "*PERSETUJUAN*") to the Indonesian version of the Agreement between the Government of the Republic of Tunisia and the Government of the Republic of Indonesia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports, has the honour to inform that the Tunisian side agrees with the abovementioned rectification.

The Embassy has further the honour to inform the Department of Foreign Affairs that the Tunisian Relevant Authorities request to have the new Original Indonesian version (Tunisian copy and Indonesian Copy) duly signed by the Indonesian Minister of Foreign Affairs in order to be submitted for signature by the Tunisian Minister for Foreign Affairs.

The Embassy of the Republic of Tunisia avails itself of this opportunity to renew to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia the assurances of its highest consideration.

Jakarta, March 2<sup>nd</sup>, 2009  
Department of Foreign Affairs  
of the Republic of Indonesia.

Jakarta



**PERJANJIAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Tunisia dan Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut para 'Pihak';

**MEMPERTIMBANGKAN** kepentingan kedua negara untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan diantara kedua negara;

**BERKEINGINAN** untuk memfasilitasi perjalanan masuk warga negara Republik Indonesia dan warga negara Republik Tunisia ke dalam wilayah negara masing-masing;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENYETUJUI** sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**PEMBEBASAN VISA**

Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang berlaku, dan warga negara Republik Tunisia, pemegang paspor diplomatik dan paspor khusus yang berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa masuk, visa transit dan visa tinggal di dalam wilayah Pihak lain dalam jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan maksimum 30 (tiga puluh) hari atas dasar persetujuan dari negara penerima dan permintaan tertulis dari misi diplomatik atau konsuler dari Pihak lainnya.

**PASAL 2**  
**MASA BERLAKU PASPOR**

Jangka waktu berlakunya paspor dari warga negara setiap Pihak sekurang-kurangnya 2 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.



**PASAL 3  
PEMBATASAN VISA**

Pemegang paspor yang berlaku dari setiap Pihak merujuk kepada Perjanjian ini diperbolehkan memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya di tempat marabun yang diijinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun.

**PASAL 4  
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER**

Warga negara dari masing-masing Pihak pemegang paspor yang berlaku, merujuk pada Pasal 1 dari Perjanjian ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah anggota keluarga merujuk kepada pasangan dan anak-anak yang belum menikah), disyaratkan, pada saat mereka tiba di wilayah Pihak lainnya, untuk memperoleh visa tinggal yang san dari Kementerian Luar Negeri Pihak lain.

**PASAL 5  
HAK INSTANSI YANG BERWENANG**

Setiap Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal bagi seseorang yang berhak atas bebas visa dan fasilitas berdasarkan Perjanjian ini, apabila orang tersebut dianggap tidak diharapkan.

**PASAL 6  
PENUNDAAN**

1. Masing-masing Pihak, setiap saat, dapat menunda sementara waktu, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Perjanjian ini, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum.
2. Berlakunya maupun berakhirnya tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik.

**PASAL 7  
SPESIMEN PASPOR**

Para Pihak saling menukarkan, melalui jalur diplomatik, spesimen paspor yang digunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Perjanjian ini berlaku atau spesimen paspor baru apapun sebelum penerbitannya.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan.

**PASAL 9  
AMANDEMEN**

Perjanjian ini dapat di'amandemen atau direvisi setiap saat berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh kedua Pihak. Amandemen atau revisi tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Pihak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

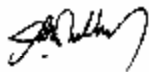
**PASAL 10  
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya melalui jalur diplomatik bahwa semua persyaratan dalam negosiasi untuk mulai berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi.
2. Perjanjian ini akan berlaku sampai salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik, 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhirannya.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Perjanjian ini.

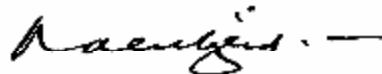
**DIBUAT** dalam dua rangkap di Bali pada 23 November 2006, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Semua naskah adalah asli. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK TUNISIA



**ABDEL WAHEB ABDALLAH**  
Menteri Luar Negeri  
Republik Tunisia

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA



**DR. N. HASSAN WIRAJUDA**  
Menteri Luar Negeri  
Republik Indonesia

**اتفاق****بين حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة الجمهورية التونسية****بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر****دبلوماسية وخاصة**

إن حكومة الجمهورية الإندونيسية وحكومة الجمهورية التونسية، تمسار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".

اعتباراً للأهمية التي يوليها البلدان لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بينهما،

ورغبة منهما في تسهيل دخول مواطني الجمهورية الإندونيسية والجمهورية التونسية إلى تراب البلد الآخر،

ومراعاة للقوانين و النرايب الجاري بها العمل في كلا البلدين،

اتفقتا على ما يلي :

#### **المادة الأولى:**

##### **إلغاء التأشيرة**

يعنى كل من مواطني الجمهورية الإندونيسية ومواطني الجمهورية التونسية، انحاملين لجوازات سفر دبلوماسية وخاصة سارية المفعول، من تأشيرة الدخول والعبور و الإقامة في تراب الطرف الآخر لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ الدخول. مع إمكانية التمديد لمدة أقصاها ثلاثون يوماً (30) بعد الحصول على موافقة البلد المضيف واعتمادا على طلب كتابي صادر عن التمثلية الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر.

#### **المادة الثانية:**

##### **مدة صلاحية جوازات السفر**

يجب أن تكون مدة صلاحية جوازات سفر مواطني البلدين ستة أشهر على الأقل عند دخول أراضي الطرف الآخر.

### المادة الثالثة:

#### قيود إسناد التأشيرة

يمكن لحاملي جوازات سفر سارية المفعول والمشار إليهم في هذا الاتفاق الدخول أو الخروج من أراضي الطرف الآخر بدون أي قيد عبر نقاط العبور المرخص فيها لهذه الغاية من قبل السلطات المختصة.

### المادة الرابعة:

#### التأشيرة المسندة لأعضاء الممثلات الدبلوماسية أو القنصلية

يجب على مواطني كلا الطرفين الحاملين للجوازات المذكورة بالمادة الأولى من هذا الاتفاق والمعتمدين لدى الممثلات الدبلوماسية أو القنصلية بتراب البلد الآخر، بما فيهم أفراد عائلاتهم (وتعني عبارة أفراد العائلة الزوجة و الأبناء غير المتزوجين) طلب الحصول عند وصولهم إلى تراب الطرف الآخر، على تأشيرة الإقامة المناسبة من وزارة الشؤون الخارجية للطرف الآخر.

### المادة الخامسة:

#### حقوق السلط

يحتفظ كل طرف بحق رفض دخول أو تخفيض مدة إقامة أي شخص مستفيد بإلغاء التأشيرة والتسهيلات المقررة بموجب هذا الاتفاق، في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

### المادة السادسة:

#### تعليق العمل بالاتفاق

- 1) يمكن لكل طرف وفي أي وقت ، إيقاف العمل مؤقتاً بهذا الاتفاق كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية.
- 2) يجب إشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ببداية ونهاية الإجراءات المتصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

### المادة السابعة:

#### نماذج جوازات السفر

يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج الجوازات المعمول بها من قبل كل طرف، و ذلك قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أو نماذج الجوازات الجديدة قبل بداية العمل بها.

### المادة الثامنة:

#### حل النزاعات

تم تسوية كل خلاف يمكن أن ينشأ عن تأويل أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق ودياً عن طريق التشاور أو التفاوض .

### المادة التاسعة:

#### التعهدات

يمكن تنقيح أو مراجعة هذا الاتفاق في أي وقت كتابياً و بتراضي الطرفين .  
وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المتفق عليه من الطرفين  
وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

### المادة العاشرة:

#### الدخول حيز التنفيذ ومدة ونهاية العمل بهذا الاتفاق


(1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بداية من تاريخ آخر إشعار يعلم بمقتضاه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر الطرق الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

(2) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية إشعار أحد الطرفين للطرف الآخر كتابيا و عبر الطرق الدبلوماسية بإنهاء العمل به و ذلك ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإنهاء.

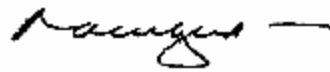
وإثباتا لذلك وقع المفاوضان المذونة اسميهما هذا الاتفاق.

حرر في نظيرين أصليين بالي يوم 23 نوفمبر 2006 باللغات الإندونيسية والعربية والإنجليزية لكل منها نفس الحجية. و في صورة الاختلاف في التأويل يتم اعتماد النص الإنجليزي.

عن حكومة الجمهورية التونسية

  
عبد الوهاب عبد الله  
وزير الشؤون الخارجية  
لجمهورية التونسية

عن حكومة جمهورية إندونيسيا

  
الدكتور حسن وبراجودا  
وزير الشؤون الخارجية  
لجمهورية إندونيسيا

**AGREEMENT**

**BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA  
ON**

**VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia, hereinafter referred to as the "Parties";

**CONSIDERING** the interest of both countries to strengthen further their friendly relations;

**DESIRING** to facilitate the entry to each other's territory of the nationals of the Republic of Indonesia and the nationals of the Republic of Tunisia;

**PURSUANT** to the prevailing laws and regulations of the respecting countries;

**HAVE AGREED** as follows:

**ARTICLE 1  
VISA EXEMPTION**

Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service passports, and nationals of the Republic of Tunisia, holders of valid diplomatic or special passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit and stay in the territory of the other Party for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry, with possible extension of maximum 30 (thirty) days on the basis of approval of the host country and written request from the diplomatic mission or consular post of the other Party.

**ARTICLE 2  
DURATION OF PASSPORT VALIDITY**

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.



**ARTICLE 3  
VISA RESTRICTION**

The holders of the valid passports of either Party referred to in this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction.

**ARTICLE 4  
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSIONS**

Nationals of each Party who are holders of valid passport referred to in Article 1 of this Agreement and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members (the term family members refers to the spouse and unmarried children), shall be required, once they arrive in the territory of the other Party, to obtain appropriate stay visa from the Ministry of Foreign Affairs of the other Party.

**ARTICLE 5  
THE RIGHT OF AUTHORITIES**

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that person undesirable.

**ARTICLE 6  
SUSPENSION**

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, for reasons pertaining to national security, public order or public health.
2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly communicated to the other Party through diplomatic channels.

**ARTICLE 7  
SPECIMEN OF PASSPORT**

The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their passports being used by each Party before this Agreement comes into force or specimens of any new passports before the passports' introduction.

**ARTICLE 8  
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.

**ARTICLE 9  
AMENDMENT**

This Agreement may be amended or revised at any time by mutual consent in writing by the two Parties. Such amendment or revision shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Agreement.

**ARTICLE 10  
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

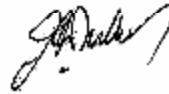
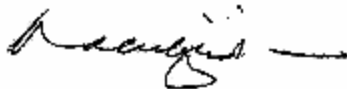
1. This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties notify each other through diplomatic channels that their internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force until either Party terminate this Agreement by giving written notice to other Party through diplomatic channels 3 (three) months prior to its termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Bali on 23 November 2006, in the Indonesian, Arabic and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC  
OF TUNISIA



DR. N. HASSAN WIRAJUDA  
Minister for Foreign Affairs  
Republic of Indonesia

ABDELWAHEB ABDALLAH  
Minister for Foreign Affairs  
Republic of Tunisia